



PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG): KUASA SIMBOLIK NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF PIERRE BOURDIEU

Kayla Keisya Azzahra¹, Siti Zahwa Arzakillah², Rifma Ghulam Dzaljad³

¹²³ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2026

Revised Juli 2026

Accepted Juli 2026

Available Juli 2026

E-mail Penulis:

kaylaaakeisya@gmail.com,

zahwaarzh@gmail.com,

rifmaghulam@uhamka.ac.id

Keywords: *Free Nutritious Meal Program, symbolic power, Pierre Bourdieu, social policy, legitimacy.*

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah. Di samping fungsi utamanya sebagai program kesejahteraan sosial, MBG juga dapat dipahami sebagai praktik sosial yang mengandung dimensi simbolik. Artikel ini bertujuan menganalisis Program Makan Bergizi Gratis melalui perspektif Pierre Bourdieu dengan menitikberatkan pada konsep kuasa simbolik, habitus, modal, dan arena sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta berbagai literatur yang relevan dengan teori Pierre Bourdieu dan kebijakan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfungsi sebagai bentuk

pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen negara dalam membangun legitimasi sosial dan memperoleh modal simbolik di mata publik, sekaligus memberikan implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui distribusi manfaat yang diterima masyarakat, negara memperoleh pengakuan dan kepercayaan yang kemudian memperkuat posisi kekuasaannya. Selain itu, program ini turut membentuk habitus baru terkait pola konsumsi sehat dan persepsi masyarakat terhadap peran negara dalam kesejahteraan sosial. Dengan demikian, MBG dapat dipahami sebagai praktik kuasa simbolik yang bekerja secara halus melalui mekanisme penerimaan sosial dan legitimasi politik.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is one of the government's policies aimed at improving the nutritional quality of society, particularly among school-aged children. In addition to its primary function as a social welfare program, MBG can also be understood as a social practice that contains symbolic dimensions. This article aims to analyze the Free Nutritious Meal Program through Pierre Bourdieu's perspective, focusing on the concepts of symbolic power, habitus, capital, and social fields. The study employs a qualitative approach using a literature review method. Data were collected from books, scientific journals, policy documents, and various literature relevant to Pierre Bourdieu's theory and social policy. The findings indicate that the Free Nutritious Meal Program not only serves as a means of fulfilling the nutritional

needs of society but also functions as an instrument through which the state builds social legitimacy and acquires symbolic capital in the eyes of the public, while simultaneously contributing to public welfare through the fulfillment of nutritional needs and the enhancement of human resource quality. Through the distribution of benefits received by society, the state gains recognition and trust, which subsequently strengthens its position of power. Furthermore, the program contributes to the formation of new habitus related to healthy consumption patterns and public perceptions of the state's role in social welfare. Therefore, MBG can be understood as a form of symbolic power that operates subtly through mechanisms of social acceptance and political legitimacy.

PENDAHULUAN

Permasalahan gizi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka sekitar 19,8%, sementara sejumlah daerah masih menghadapi persoalan gizi kurang dan anemia pada anak usia sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah pemenuhan gizi belum sepenuhnya teratasi dan masih memerlukan intervensi pemerintah melalui kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan. Berbagai persoalan seperti stunting, gizi buruk, kekurangan asupan protein, serta ketimpangan akses terhadap makanan sehat masih ditemukan di berbagai daerah. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kualitas pendidikan, produktivitas, serta daya saing bangsa di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menghadirkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program-program kesejahteraan sosial. Salah satu kebijakan yang saat ini menjadi perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini merupakan kebijakan nasional yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025 dan bertujuan meningkatkan status gizi anak usia sekolah sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. (Hukum & Semarang, 2024)

Secara umum, Program Makan Bergizi Gratis dipahami sebagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan mengurangi kesenjangan akses terhadap makanan sehat (Kiftiyah et al., 2025). Sejak mulai dijalankan secara nasional pada tahun 2025, Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada pertengahan tahun 2025 jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 7,7 juta orang dan meningkat menjadi hampir 60 juta penerima manfaat pada awal tahun 2026 dengan target akhir mencapai 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diposisikan sebagai salah satu instrumen pembangunan sosial yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nutrisi peserta didik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Program ini diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan nutrisi peserta didik sehingga dapat mendukung tumbuh kembang, meningkatkan konsentrasi belajar, serta menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. Dalam perspektif pembangunan sosial,



kebijakan tersebut merupakan bentuk intervensi negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, jika ditelaah lebih jauh, kebijakan publik tidak hanya memiliki fungsi praktis dan material, melainkan juga mengandung dimensi sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi hubungan antara negara dan masyarakat. (Yuliani et al., 2026)

Setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah pada dasarnya merupakan bagian dari praktik sosial yang sarat dengan makna. Kebijakan tidak hanya menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tetapi juga membentuk persepsi, kepercayaan, dan cara pandang masyarakat terhadap institusi negara. Dalam konteks ini, Program Makan Bergizi Gratis dapat dipahami bukan hanya sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi, melainkan juga sebagai instrumen yang memiliki nilai simbolik. Besarnya cakupan program juga terlihat dari peningkatan anggaran yang dialokasikan pemerintah. Anggaran MBG yang pada awal pelaksanaan sebesar Rp71 triliun meningkat menjadi sekitar Rp268-335 triliun pada tahun 2026, disertai perluasan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga lebih dari 27.000 unit di berbagai daerah. Kehadiran negara melalui program tersebut menciptakan relasi tertentu dengan masyarakat, di mana negara diposisikan sebagai pihak yang hadir, peduli, dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Relasi tersebut kemudian berpotensi menghasilkan pengakuan sosial yang memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat.

Untuk memahami fenomena tersebut secara lebih mendalam, perspektif Pierre Bourdieu menjadi salah satu pendekatan yang relevan digunakan. Bourdieu merupakan sosiolog Prancis yang banyak membahas hubungan antara kekuasaan, praktik sosial, dan simbol dalam kehidupan masyarakat. Menurut Bourdieu (1991), kekuasaan tidak selalu bekerja melalui paksaan fisik, aturan hukum, ataupun kontrol ekonomi semata. Kekuasaan juga dapat bekerja melalui simbol-simbol yang diterima dan dianggap wajar oleh masyarakat. Bentuk kekuasaan semacam ini dikenal sebagai kuasa simbolik (*symbolic power*), yaitu kemampuan suatu individu atau institusi untuk memperoleh pengakuan, legitimasi, dan kepatuhan tanpa harus menggunakan kekerasan secara langsung. (Bourdieu, 1983)

Konsep kuasa simbolik menjadi penting karena menjelaskan bagaimana dominasi dapat berlangsung secara halus dan sering kali tidak disadari oleh pihak yang didominasi. Dalam pandangan Bourdieu, masyarakat cenderung menerima berbagai bentuk praktik sosial sebagai sesuatu yang alami, padahal di dalamnya terdapat relasi kuasa yang terus direproduksi. Negara sebagai institusi yang memiliki otoritas besar dapat menggunakan berbagai kebijakan sosial untuk memperoleh legitimasi dan pengakuan publik. Melalui kebijakan yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, negara memperoleh modal simbolik berupa kepercayaan, penghormatan, dan citra positif yang kemudian memperkuat posisinya dalam arena sosial maupun politik.

Selain konsep kuasa simbolik, Bourdieu juga memperkenalkan konsep habitus, modal (*capital*), dan arena (*field*) yang saling berkaitan dalam menjelaskan dinamika kehidupan sosial. Habitus merupakan seperangkat disposisi yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan memandang dunia yang diperoleh individu melalui pengalaman sosialnya. Modal mencakup berbagai sumber daya yang dimiliki individu atau kelompok, seperti modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Sementara itu, arena merupakan ruang sosial tempat berbagai aktor berinteraksi, bersaing, dan mempertahankan posisinya. Ketiga konsep tersebut dapat

digunakan untuk menjelaskan bagaimana Program Makan Bergizi Gratis beroperasi tidak hanya sebagai kebijakan kesejahteraan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang menghasilkan dan mereproduksi kekuasaan simbolik. (Fauzi et al., 2026)

Dalam pelaksanaannya, Program Makan Bergizi Gratis melibatkan berbagai aktor sosial, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, tenaga pendidik, pelaku usaha pangan, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat. Interaksi berbagai aktor tersebut menciptakan sebuah arena sosial yang memungkinkan terjadinya pertukaran kepentingan, pengakuan, dan legitimasi. Negara tidak hanya mendistribusikan bantuan dalam bentuk makanan bergizi, tetapi juga membangun citra sebagai institusi yang memiliki kepedulian terhadap masa depan generasi muda. Melalui proses tersebut, negara berpotensi memperoleh modal simbolik yang semakin memperkuat legitimasinya di tengah masyarakat.

Di sisi lain, program ini juga dapat memengaruhi pembentukan habitus masyarakat. Kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi yang diperkenalkan melalui program tersebut berpotensi membentuk pola hidup sehat yang berlangsung dalam jangka panjang. Selain itu, masyarakat dapat mengembangkan cara pandang tertentu mengenai peran negara dalam kehidupan sosial. Negara dipersepsikan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga hubungan antara pemerintah dan warga negara semakin diperkuat melalui praktik-praktik sosial yang berlangsung secara berkelanjutan.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya banyak membahas efektivitas Program Makan Bergizi Gratis dari aspek kesehatan, gizi, dan implementasi kebijakan, kajian yang menelaah program ini sebagai praktik kuasa simbolik negara melalui konsep habitus, modal simbolik, dan arena sosial Pierre Bourdieu masih relatif terbatas. Padahal, program sosial berskala nasional tidak hanya menghasilkan dampak kesejahteraan, tetapi juga berpotensi membentuk legitimasi dan pengakuan sosial terhadap negara. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana MBG berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan sekaligus sarana produksi kuasa simbolik negara. Berdasarkan uraian tersebut, Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dipahami hanya sebagai kebijakan pemenuhan kebutuhan gizi semata. Program ini juga merupakan praktik sosial yang mengandung dimensi simbolik, di mana negara memperoleh legitimasi melalui distribusi manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis Program Makan Bergizi Gratis menggunakan perspektif Pierre Bourdieu dengan fokus pada konsep kuasa simbolik, habitus, modal simbolik, dan arena sosial untuk memahami bagaimana program tersebut membangun legitimasi negara serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk memperkuat analisis tersebut, penelitian ini juga menelaah data perkembangan program serta sejumlah kasus yang muncul dalam pelaksanaan MBG di lapangan seperti data jumlah penerima manfaat, anggaran, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maupun kasus dugaan keracunan dan persoalan tata kelola sebagai pijakan empiris untuk melihat dinamika akumulasi modal simbolik negara sekaligus risiko delegitimasi yang menyertainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terhadap buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi, serta berbagai literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan perspektif Pierre Bourdieu



untuk menjelaskan kuasa simbolik negara dalam Program Makan Bergizi Gratis. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan sosial, kekuasaan, legitimasi, dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan fenomena sosial yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui perspektif teori Pierre Bourdieu. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji makna yang terkandung di balik suatu kebijakan, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif atau angka-angka statistik, tetapi juga pada dimensi sosial, simbolik, dan relasi kuasa yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut.

Metode studi kepustakaan digunakan karena objek penelitian dianalisis melalui berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mengkaji, serta menganalisis berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, literatur yang digunakan meliputi buku-buku karya Pierre Bourdieu, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi, serta berbagai sumber akademik yang membahas kebijakan sosial, kuasa simbolik, habitus, modal, dan arena sosial.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis, seperti informasi kebijakan pemerintah, dokumen perencanaan program, data capaian program (jumlah penerima manfaat, anggaran, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), serta berbagai publikasi resmi yang menjelaskan tujuan, sasaran, dan mekanisme pelaksanaan program. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, penelitian terdahulu yang membahas teori Pierre Bourdieu dan penerapannya dalam menganalisis fenomena sosial, politik, maupun kebijakan publik, serta laporan pemantauan dan pemberitaan terkini mengenai kasus-kasus yang muncul dalam pelaksanaan MBG di lapangan. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan sosial dan praktik kuasa simbolik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang telah terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Dalam proses ini, peneliti memprioritaskan sumber-sumber akademik yang berasal dari jurnal ilmiah, buku teori, serta dokumen resmi pemerintah agar data yang digunakan memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis dengan menggunakan kerangka teori Pierre Bourdieu. Proses analisis dimulai dengan membaca dan memahami seluruh data yang telah diperoleh, kemudian mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan konsep kuasa simbolik, habitus, modal, dan arena

sosial. Selanjutnya, data dianalisis dengan cara menghubungkan temuan-temuan yang terdapat dalam literatur dengan fenomena Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan sosial yang dijalankan oleh negara.

Dalam penelitian ini, konsep arena (field) digunakan untuk menganalisis bagaimana Program Makan Bergizi Gratis menjadi ruang interaksi antara berbagai aktor sosial, seperti pemerintah, sekolah, masyarakat, dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam pelaksanaannya. Konsep modal (capital) digunakan untuk memahami bentuk-bentuk sumber daya yang dimiliki oleh aktor-aktor tersebut, khususnya modal simbolik yang diperoleh negara melalui pelaksanaan program. Selanjutnya, konsep habitus digunakan untuk melihat bagaimana program tersebut berpotensi membentuk pola pikir, kebiasaan, dan cara pandang masyarakat terhadap kesehatan, gizi, serta peran negara dalam kehidupan sosial. Sementara itu, konsep kuasa simbolik digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara memperoleh legitimasi dan pengakuan sosial melalui kebijakan yang diterima dan dianggap bermanfaat oleh masyarakat.

Secara operasional, keempat konsep tersebut dibedah dan diposisikan sebagai instrumen analisis yang saling berkaitan. Konsep arena digunakan untuk memetakan posisi dan kepentingan setiap aktor yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sekolah, penyedia SPPG, hingga guru, orang tua, dan siswa sebagai penerima manfaat sekaligus pihak yang paling rentan menanggung risiko program. Konsep modal, khususnya modal simbolik, digunakan untuk membaca bagaimana negara mengonversi capaian kuantitatif program—jumlah penerima manfaat, besaran anggaran, dan jumlah SPPG yang beroperasi—menjadi pengakuan dan kepercayaan publik. Konsep habitus digunakan untuk menelusuri pergeseran cara pandang masyarakat, baik ke arah penguatan kepercayaan terhadap negara maupun sebaliknya, yaitu kewaspadaan dan kecurigaan struktural ketika manfaat program berbenturan dengan risiko keamanan pangan. Adapun konsep kuasa simbolik digunakan sebagai kerangka payung untuk menjelaskan mekanisme negara dalam mempertahankan legitimasi, termasuk melalui strategi wacana yang meminimalkan persoalan konkret yang muncul di lapangan.

Untuk menguji ketajaman keempat konsep tersebut secara empiris, penelitian ini menempatkan dua peristiwa dugaan keracunan MBG sebagai studi kasus instrumental (*instrumental case study*), yaitu kasus di SD Negeri 3 Sinar Sari, Kabupaten Lampung Utara pada Januari 2026 dan kasus di sejumlah sekolah dasar di kawasan Cakung dan Pulogebang, Jakarta Timur pada Mei 2026. Kedua kasus dipilih secara purposif karena sama-sama merepresentasikan titik temu antara akumulasi modal simbolik negara dan risiko delegitimasi akibat persoalan keamanan pangan, namun terjadi pada konteks wilayah, skala korban, dan bentuk respons publik yang berbeda, sehingga memungkinkan perbandingan yang memperkaya analisis kuasa simbolik dalam penelitian ini. Data mengenai kedua kasus tersebut diperoleh melalui teknik dokumentasi terhadap pemberitaan media daring yang kredibel, kemudian dianalisis secara deskriptif-kritis dengan merujuk pada keempat konsep Bourdieu yang telah diuraikan sebelumnya.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur, baik berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi



pemerintah, maupun hasil penelitian terdahulu. Melalui proses tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang digunakan tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan didukung oleh berbagai referensi yang memiliki kredibilitas akademik. Selain itu, triangulasi teori juga digunakan dengan membandingkan hasil analisis terhadap konsep-konsep utama dalam pemikiran Pierre Bourdieu sehingga interpretasi yang dihasilkan menjadi lebih mendalam dan objektif.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dan argumentatif. Penyajian data dilakukan dengan menjelaskan hubungan antara Program Makan Bergizi Gratis dan konsep-konsep yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat dipahami sebagai praktik kuasa simbolik yang berperan dalam membentuk legitimasi negara, menghasilkan modal simbolik, serta memiliki implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dimensi sosial dan simbolik yang terkandung dalam kebijakan publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus MBG di Lampung Utara: Retaknya Kuasa Simbolik Negara melalui Resistensi Aktor Lokal



Foto: Tangkapan layar video guru SD ngamuk karena makanan MBG basi (Dok. Istimedia/Tangkapan Layar)

Jakarta - Viral di media sosial seorang wanita yang merupakan guru di SD Negeri 3 Sinar Sari, Kabupaten Lampung Utara marah usai sekolahnya mendapat paket **Makan Bergizi Gratis (MBG)** basi. Adapun ada 11 siswa diduga mengalami gejala keracunan usai menyantap MBG.

Dalam video yang beredar terlihat guru bernama Ida Yuliana menunjukkan kondisi paket MBG yang dinilai sudah tak layak konsumsi. Dia memperlihatkan tempe dan buah anggur yang membusuk.

Kasus yang terjadi di SD Negeri 3 Sinar Sari, Lampung Utara, menjadi salah satu contoh bagaimana implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memengaruhi legitimasi negara sebagai penyelenggara kebijakan publik. Berdasarkan pemberitaan DetikNews, seorang guru secara terbuka menyampaikan protes terhadap makanan MBG yang diterima sekolah karena ditemukan dalam kondisi basi. Tidak lama setelah makanan tersebut dikonsumsi, sebelas siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan seperti mual dan muntah. Video protes guru yang beredar luas di media sosial kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan kritik terhadap kualitas pelaksanaan program.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Program MBG merupakan sebuah arena (field), yaitu ruang sosial yang mempertemukan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Arena tersebut tidak hanya diisi oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sekolah, guru, penyedia makanan, tenaga kesehatan, orang tua, media massa, dan masyarakat

sebagai penerima manfaat. Setiap aktor memiliki posisi serta modal yang berbeda dalam mempertahankan kepentingannya.

Pemerintah memasuki arena dengan membawa modal simbolik, yaitu legitimasi sebagai institusi yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui Program MBG. Modal simbolik tersebut dibangun melalui narasi bahwa negara hadir untuk memenuhi hak dasar anak-anak memperoleh makanan bergizi. Dalam pandangan Bourdieu (1991), modal simbolik merupakan

bentuk pengakuan, kehormatan, dan kepercayaan yang diperoleh suatu aktor ketika tindakannya dianggap sah dan bernilai oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan MBG pada awal pelaksanaannya menjadi sumber legitimasi bagi pemerintah.

Namun, legitimasi tersebut mulai mengalami gangguan ketika implementasi program tidak berjalan sesuai dengan simbol yang dibangun. Makanan yang diterima siswa dalam kondisi tidak layak konsumsi menciptakan kontradiksi antara citra kepedulian negara dan realitas yang dialami masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, kuasa simbolik negara mengalami proses delegitimasi. Bourdieu menjelaskan bahwa kuasa simbolik hanya dapat bekerja apabila masyarakat mengakui dan menerima otoritas tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Ketika praktik sosial bertentangan dengan nilai yang diproduksi melalui simbol, maka pengakuan masyarakat akan mulai berkurang.

Guru dalam kasus ini memiliki posisi yang menarik dalam arena sosial. Sebagai bagian dari pelaksana kebijakan, guru seharusnya berperan mendukung implementasi program. Akan tetapi, ketika keselamatan siswa terancam, guru justru melakukan resistensi simbolik melalui penyampaian kritik secara terbuka di media sosial. Tindakan tersebut merupakan bentuk kontestasi terhadap kuasa simbolik negara karena guru berusaha membongkar ketidaksesuaian antara simbol kepedulian yang dibangun pemerintah dengan fakta yang terjadi di lapangan. Media sosial kemudian memperluas ruang pertarungan tersebut sehingga kritik yang awalnya bersifat lokal berubah menjadi isu nasional.

Kasus ini juga memperlihatkan perubahan habitus masyarakat. Sebelum insiden terjadi, masyarakat menerima Program MBG sebagai kebijakan yang mencerminkan perhatian negara terhadap kesejahteraan anak. Akan tetapi, pengalaman menerima makanan basi membentuk disposisi baru berupa kewaspadaan terhadap kualitas makanan yang disediakan pemerintah. Dalam perspektif Bourdieu, habitus terbentuk melalui pengalaman yang terus diulang. Pengalaman negatif tersebut berpotensi mengubah cara masyarakat memandang negara, dari semula penuh kepercayaan menjadi lebih kritis terhadap setiap kebijakan sosial yang diberikan.

Dengan demikian, kasus Lampung Utara menunjukkan bahwa kuasa simbolik negara tidak bersifat permanen. Simbol kepedulian yang dibangun melalui Program MBG dapat kehilangan maknanya ketika implementasi program gagal memenuhi harapan masyarakat. Resistensi guru sebagai aktor lokal memperlihatkan bahwa dominasi simbolik negara selalu berhadapan dengan kemungkinan munculnya kritik dari aktor-aktor yang mengalami langsung dampak kebijakan tersebut.



Analisis Kasus MBG di Jakarta Timur: Kontestasi Modal Simbolik dan Krisis Legitimasi dalam Arena Kebijakan Publik



Kasus dugaan keracunan yang menimpa 252 siswa sekolah dasar di Jakarta Timur menunjukkan dimensi yang lebih kompleks dibandingkan kasus Lampung Utara. Berdasarkan pemberitaan Kompas.id, ratusan siswa dari beberapa sekolah mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan Program Makan Bergizi Gratis. Hasil investigasi menunjukkan bahwa makanan diduga terkontaminasi akibat penggunaan bahan pangan yang tidak segar, proses pengolahan yang kurang memenuhi standar, serta belum terpenuhinya aspek higienitas dapur penyedia makanan.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kasus ini menunjukkan bahwa arena Program MBG merupakan ruang pertarungan berbagai kepentingan yang melibatkan pemerintah, penyedia makanan, sekolah, tenaga kesehatan, media massa, dan masyarakat. Pemerintah berusaha mempertahankan citra keberhasilan program melalui perluasan jumlah penerima manfaat, sedangkan masyarakat menilai keberhasilan tersebut berdasarkan pengalaman nyata

yang mereka rasakan. Dengan demikian, arena MBG menjadi ruang tempat berlangsungnya kontestasi antara narasi keberhasilan pemerintah dan realitas implementasi kebijakan.

Pemerintah sebelumnya telah berhasil mengakumulasi modal simbolik melalui keberhasilan memperluas cakupan Program MBG ke berbagai wilayah. Dalam teori Bourdieu, modal simbolik diperoleh ketika masyarakat memberikan pengakuan terhadap tindakan yang dilakukan suatu institusi. Program MBG dipersepsikan sebagai bukti bahwa negara hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah memperoleh legitimasi sosial yang cukup besar.

Namun, kasus keracunan massal di Jakarta Timur memperlihatkan bahwa modal simbolik tersebut sangat bergantung pada kualitas praktik yang dijalankan. Jumlah korban yang mencapai ratusan siswa memperkuat perhatian media dan masyarakat sehingga peristiwa tersebut berkembang menjadi persoalan nasional. Dalam kondisi demikian, simbol kepedulian negara mengalami pergeseran makna. Program yang sebelumnya dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anak justru dipersepsikan sebagai kebijakan yang belum mampu menjamin keamanan pangan. Akibatnya, legitimasi pemerintah mengalami tekanan karena pengakuan masyarakat mulai dipengaruhi oleh pengalaman negatif yang muncul di lapangan.

Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana kuasa simbolik bekerja secara dinamis. Menurut Bourdieu, kuasa simbolik tidak diperoleh melalui paksaan, tetapi melalui pengakuan masyarakat terhadap legitimasi suatu institusi. Ketika implementasi kebijakan gagal memenuhi ekspektasi publik, pengakuan tersebut mulai melemah sehingga kuasa simbolik negara tidak lagi diterima secara otomatis. Pemerintah kemudian berupaya mempertahankan legitimasi melalui berbagai pernyataan resmi yang menekankan bahwa kasus keracunan merupakan bagian kecil dari keseluruhan pelaksanaan Program MBG. Strategi komunikasi tersebut dapat

dipahami sebagai bentuk reproduksi kuasa simbolik, yaitu usaha mempertahankan citra keberhasilan program meskipun dihadapkan pada berbagai kritik.

Dari aspek habitus, kasus Jakarta Timur memperlihatkan terbentuknya pola pikir baru di kalangan masyarakat, khususnya orang tua siswa. Apabila sebelumnya makanan yang diberikan negara dianggap aman dan bermanfaat, pengalaman keracunan justru membentuk kebiasaan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kualitas makanan di sekolah. Habitus baru ini tidak hanya memengaruhi perilaku individu, tetapi juga mengubah relasi antara masyarakat dengan negara. Masyarakat menjadi lebih aktif mengawasi kebijakan publik dan tidak lagi menerima setiap program pemerintah secara pasif.

Kasus Jakarta Timur juga memperlihatkan bahwa media massa memiliki posisi penting dalam arena sosial sebagai aktor yang mampu mengubah isu lokal menjadi perhatian nasional. Publikasi media mempercepat penyebaran informasi mengenai keracunan sehingga memperbesar tekanan terhadap pemerintah untuk memberikan penjelasan dan melakukan evaluasi. Dalam perspektif Bourdieu, media memiliki modal simbolik berupa kemampuan membentuk opini publik. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai keracunan MBG tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memengaruhi proses pembentukan legitimasi maupun delegitimasi negara.

Berdasarkan analisis tersebut, kasus Jakarta Timur menunjukkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat. Dalam perspektif kuasa simbolik Pierre Bourdieu, keberhasilan kebijakan juga ditentukan oleh kemampuan negara mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui implementasi yang konsisten, transparan, dan berkualitas. Ketika pengalaman masyarakat bertentangan dengan simbol kepedulian yang dibangun pemerintah, maka modal simbolik yang telah diperoleh berpotensi berubah menjadi krisis legitimasi.

Analisis Kritis: Mengapa Program MBG Tetap Bertahan di Tengah Berbagai Persoalan Implementasi?

Dari berbagai kasus dugaan keracunan, makanan basi, hingga lemahnya pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), muncul pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu mengapa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap memperoleh dukungan politik dan terus dilanjutkan meskipun menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan suatu kebijakan publik tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan implementasinya, tetapi juga oleh kemampuan negara mempertahankan kuasa simbolik melalui produksi legitimasi dan penguasaan atas wacana publik.

Menurut Bourdieu, negara merupakan aktor yang memiliki modal simbolik paling besar dibandingkan aktor lain karena negara memiliki otoritas untuk menentukan apa yang dianggap benar, baik, dan layak diterima masyarakat. Program MBG sejak awal dikonstruksikan bukan hanya sebagai kebijakan pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai simbol keberpihakan negara terhadap kesejahteraan rakyat dan masa depan generasi muda. Simbol tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga berbagai persoalan teknis di lapangan sering kali dipahami sebagai penyimpangan administratif, bukan sebagai kegagalan kebijakan secara keseluruhan.



Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya mendistribusikan makanan, tetapi juga mendistribusikan makna. Melalui berbagai pidato, konferensi pers, publikasi media, dan laporan capaian program, negara membangun narasi bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Narasi tersebut menghasilkan doxa, yaitu keyakinan kolektif yang diterima masyarakat sebagai sesuatu yang wajar dan sulit dipertanyakan. Akibatnya, kritik terhadap kualitas pelaksanaan program sering kali tenggelam di bawah narasi besar mengenai pentingnya peningkatan gizi nasional.

Dari sudut pandang Bourdieu, inilah bentuk kerja kuasa simbolik. Dominasi negara tidak dilakukan melalui paksaan, melainkan melalui kemampuan membentuk cara masyarakat memahami realitas. Fokus publik diarahkan pada besarnya jumlah penerima manfaat, nilai anggaran yang dialokasikan, serta target pembangunan sumber daya manusia, sementara berbagai persoalan seperti makanan basi, keracunan, atau lemahnya pengawasan ditempatkan sebagai kasus yang bersifat insidental. Dengan demikian, negara berhasil mempertahankan legitimasi melalui pengendalian terhadap makna kebijakan.

Kritik terhadap Struktur Kebijakan Politik

Jika ditelaah lebih jauh, Program MBG juga menunjukkan bagaimana kebijakan sosial dapat menjadi bagian dari arena politik. Dalam teori Bourdieu, arena politik merupakan ruang pertarungan antaraktor untuk memperoleh dan mempertahankan berbagai bentuk modal, terutama modal simbolik yang kemudian dapat dikonversi menjadi modal politik.

Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang memiliki visibilitas tinggi karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan program bukan hanya menghasilkan peningkatan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat citra pemerintah sebagai institusi yang berpihak kepada rakyat. Semakin besar cakupan penerima manfaat, semakin besar pula peluang pemerintah memperoleh legitimasi politik.

Dalam kondisi seperti ini, evaluasi kritis terhadap kualitas implementasi sering kali berada di posisi kedua dibandingkan kepentingan menjaga keberlanjutan program. Hal tersebut menjelaskan mengapa berbagai kasus keracunan tidak serta-merta menghentikan pelaksanaan MBG. Yang lebih diutamakan adalah menjaga keberlangsungan simbol bahwa negara tetap hadir memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, keberlangsungan simbol lebih diprioritaskan dibandingkan pembenahan struktur implementasi secara menyeluruh.

Bourdieu menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk reproduksi kekuasaan melalui simbol. Negara berupaya mempertahankan legitimasi bukan hanya melalui keberhasilan nyata, tetapi juga melalui kemampuan mempertahankan citra keberhasilan di ruang publik.

Kritik terhadap Kepentingan Ekonomi

Selain dimensi politik, MBG juga memperlihatkan adanya arena ekonomi yang melibatkan berbagai aktor seperti yayasan pengelola, penyedia bahan pangan, perusahaan katering, distributor logistik, hingga pelaku usaha lokal. Dalam perspektif Bourdieu, arena ekonomi merupakan ruang pertarungan untuk memperoleh modal ekonomi yang kemudian dapat dikonversi menjadi modal sosial maupun modal simbolik.

Besarnya anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah menjadikan program ini sebagai ruang yang sangat strategis bagi berbagai kelompok kepentingan. Tidak mengherankan apabila berbagai laporan menunjukkan adanya dugaan konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG maupun keterlibatan aktor-aktor yang memiliki kedekatan politik dengan pengambil kebijakan.

Dalam kerangka Bourdieu, fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak pernah benar-benar netral. Setiap arena selalu menjadi ruang perebutan modal oleh aktor-aktor yang memiliki posisi berbeda. Oleh karena itu, persoalan makanan basi atau keracunan tidak hanya dapat dipahami sebagai kegagalan teknis, tetapi juga sebagai konsekuensi dari struktur arena yang lebih menekankan percepatan distribusi dan perluasan program dibandingkan penguatan sistem pengawasan mutu.

Artinya, logika ekonomi dalam implementasi MBG berpotensi menggeser tujuan utama program. Ketika keberhasilan lebih banyak diukur berdasarkan jumlah dapur yang beroperasi, besarnya anggaran yang terserap, atau banyaknya penerima manfaat, maka kualitas makanan menjadi aspek yang relatif kurang mendapatkan perhatian.

Kekerasan Simbolik (Symbolic Violence) dalam Program MBG

Konsep lain yang sangat penting dalam teori Bourdieu adalah kekerasan simbolik (symbolic violence). Kekerasan simbolik merupakan bentuk dominasi yang berlangsung secara halus sehingga pihak yang didominasi sering kali tidak menyadarinya.

Dalam konteks MBG, masyarakat menerima narasi bahwa program tersebut merupakan bentuk kepedulian negara sehingga berbagai persoalan implementasi dianggap sebagai risiko yang wajar dalam program berskala besar. Akibatnya, perhatian publik lebih banyak diarahkan pada rasa syukur karena memperoleh bantuan daripada tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik.

Bahkan ketika terjadi kasus keracunan, diskursus publik sering kali bergeser dari pertanyaan mengenai mengapa negara gagal menjamin keamanan pangan, menjadi bagaimana memperbaiki pelaksanaan agar program tetap berjalan. Pergeseran fokus tersebut merupakan contoh bagaimana kuasa simbolik bekerja. Kritik terhadap struktur kebijakan menjadi berkurang karena masyarakat telah menerima asumsi dasar bahwa keberadaan program lebih penting daripada mempertanyakan mekanisme kekuasaan yang melatarbelakanginya.

Dalam perspektif Bourdieu, kondisi tersebut merupakan bentuk kekerasan simbolik karena masyarakat menerima dominasi negara melalui simbol kepedulian tanpa sepenuhnya menyadari adanya relasi kuasa yang sedang direproduksi. Negara memperoleh legitimasi, sementara persoalan struktural seperti lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, dan ketimpangan distribusi tanggung jawab cenderung tidak menjadi fokus utama dalam ruang publik.

Implikasi Teoretis

Analisis ini menunjukkan bahwa Program MBG bukan sekadar kebijakan pemenuhan gizi, melainkan juga instrumen reproduksi kekuasaan negara. Keberlanjutan program di tengah berbagai kasus keracunan tidak dapat dijelaskan



hanya melalui alasan administratif atau teknis, tetapi juga melalui kemampuan negara mengakumulasi modal simbolik, membentuk doxa mengenai pentingnya MBG, serta mempertahankan legitimasi melalui penguasaan atas arena politik, ekonomi, dan media. Dengan demikian, dalam perspektif Pierre Bourdieu, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya bergantung pada efektivitas implementasinya, tetapi juga pada kemampuan aktor dominan mempertahankan pengakuan sosial atas kebijakan tersebut, meskipun di dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan struktural yang belum terselesaikan.

KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai praktik kuasa simbolik yang berlangsung dalam arena sosial. Melalui perspektif Pierre Bourdieu, program ini menunjukkan bagaimana negara dapat memperoleh legitimasi dan modal simbolik melalui distribusi manfaat kepada masyarakat.

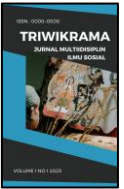
Pelaksanaan MBG menghasilkan pengakuan sosial terhadap negara sebagai institusi yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Pengakuan tersebut menjadi modal simbolik yang memperkuat posisi negara dalam kehidupan sosial dan politik. Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam pembentukan habitus baru terkait pola konsumsi sehat dan persepsi masyarakat mengenai peran negara dalam pembangunan kesejahteraan.

Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memiliki dimensi material berupa pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga dimensi simbolik yang berkaitan dengan produksi legitimasi, pembentukan habitus, dan reproduksi kekuasaan. Oleh karena itu, analisis kebijakan sosial perlu mempertimbangkan aspek simbolik agar dapat memahami secara lebih komprehensif hubungan antara negara, masyarakat, dan kekuasaan.

Selain menghasilkan legitimasi dan modal simbolik bagi negara, Program Makan Bergizi Gratis juga memiliki implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik yang berpotensi mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P. (1983). THE FORMS OF CAPITAL.
- Fauzi, A., Abidin, Z., Ramadan, H., Mukarom, Z., Studi, P., Islam, P., Islam, U., & Sunan, N. (2026). Habitus di arena simbolik : dekonstruksi feodalisme dan konversi modal simbolik dalam praktik khidmah santri. 12(1).
- Fowler, B. (2020). Pierre Bourdieu on social transformation , with particular reference to political and symbolic revolutions. 439-463.
- Hukum, F., & Semarang, U. N. (2024). Kekerasan dan Kuasa Simbolik dalam Hukum : Sebuah Kritik Ideologi atas Legitimasi Cipta Kerja. 7(1), 1-41. <https://doi.org/10.22437/ujh.7.1.1-41>
- Indy Safitri¹, Agung Permadi², M. R. M., & Vieronica Varbi Sununianti⁴, Istiqomah⁵, D. A. K. (2026). UANG SEBAGAI SIMBOL KEKUASAAN : ANALISIS PIERRE BOURDIEU. 11, 980-984.
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 5(1), 101-112.



- Mulyani, S., & Maifizar, A. (2025). Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis 2025: Studi Literatur Dilema Efektivitas dan Kualitas. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 6(2), 134-139.
- Yuliani, F., Juniarsih, W., & Prayitno, H. J. (2026). Kebijakan Makan Bergizi Gratis Di Indonesia: Analisis Implementasi, Dampak Terhadap Sumber Daya Manusia, Dan Implikasinya Pada Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(02), 212-224.
- Saputra, T. (2026, Januari 13). Guru SD di Lampung Ngamuk Dapat MBG Basi, Ada 11 Siswa Diduga Keracunan. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-8304750/guru-sd-di-lampung-ngamuk-dapat-mbg-basi-ada-11-siswa-diduga-keracunan>
- Kompas.id. (2026, Mei 9). 252 Murid SD Diduga Keracunan MBG di Jakarta Timur. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/252-murid-sd-diduga-keracunan-mbg-di-jakarta-timur>